

PENTINGNYA PENGADAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN

SERTA PEMELIHARAAN KEHANDALANNYA

UNTUK KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS PELAYARAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia merupakan urutan ke 2 dari 10 negara yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km berdasarkan data PBB tahun 2008, terakhir adalah 99.093 km berdasarkan hasil survey lapangan badan informasi Geospasial dan kajian survey Toponimi team nasional tahun 2007 – 2010 dengan mengacu definisi pulau yang ditetapkan oleh PBB, sebelumnya sering dipergunakan instansi Pemerintah sebagai bahan referensi garis pantai sepanjang 81.000 km dengan jumlah pulau sebanyak 13.466.

Sebagai negara kepulauan, posisi Indonesia sangat strategis menjadi jalur pelayaran perniagaan internasional mengingat letak geografisnya berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta menghubungkan antara samudera Hindia dengan samudera Pasifik, erat kaitannya dengan perekonomian dunia yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan perdagangan internasional.

Sebagai konsekuensi dari suatu negara kepulauan yang dilalui jalur perniagaan dunia, Indonesia berkewajiban dan telah memberi ruang perlintasan pelayaran internasional yang dikenal dengan nama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), keberadaannya harus dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah bagi pendapatan devisa negara namun kondisi saat ini belum dikelola oleh Indonesia dibanding dengan negara Singapura.

Keberadaan ke tiga ALKI tentu akan membebani anggaran bagi Pemerintah mengingat Alur Laut Kepulauan Indonesia memiliki kedalaman yang berbeda sehingga memerlukan adanya PEMASANGAN, PENANDAAN dan PERAWATAN Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk keselamatan kapal berlalu-lintas. Kegiatan perawatan SBNP saat ini baru satu negara yaitu Jepang melalui yayasan Malacca Strait Council (MSC) yang memberikan bantuan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) namun masih dalam wilayah terbatas hanya di perairan Selat Malaka, sedangkan armada niaga negara-negara pengguna ALKI lainnya belum memberikan kontribusi. Indonesia perlu menyuarakan dan mengajak kerja sama antar negara-negara yang menggunakan ALKI terutama BANTUAN DANA untuk pengadaan dan perawatan SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN. Issue ini harus disampaikan oleh delegasi Indonesia yang menghadiri sidang IMO di Dewan Komisi Keselamatan Maritim Dunia yang setiap tahunnya diselenggarakan di London, sebagai tanggung jawab bersama bagi semua negara pengguna jalur ALKI.

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, Indonesia memiliki 2.400 pelabuhan laut terbuka untuk perdagangan internasional dan antar pulau yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan berbagai bentuk Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), saat ini Indonesia baru mencapai kecukupan 60% jika dibanding dengan panjang garis pantainya, sedangkan faktor kehandalan baru mencapai 90% seharusnya faktor kehandalan SBNP adalah di atas 95%, agar Indonesia tidak dianggap perairannya sebagai *Black Area* yaitu suatu keadaan perairan yang sangat berbahaya untuk pelayaran. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah untuk selalu dilakukan pengadaan dan perawatan SBNP bila ingin Indonesia tidak dianggap sebagai kawasan perairan *Black Area*.

Jumlah pelabuhan laut dan panjang alur pelayaran serta ketersediaan/kecukupan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) ditinjau dari aspek pengadaan dan pemeliharaan belum optimal dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, DISARANKAN agar Perusahaan Swasta Nasional diberikan kesempatan selain dari sektor pengadaan barang dan jasa SBNP, untuk sektor pemeliharaan Perusahaan Swasta Nasional perlu diikuti-sertakan berpartisipasi dalam kegiatan perawatan dan Pemerintah berkewajiban mempertahankan kehandalan SBNP sesuai ketentuan internasional IALA di atas 97%.

(Capt. Dalle Effendi)